



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 65/BM.02.01/UE/C.II/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan FGD

Jakarta, 7 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM/BKPP
(Daftar Instansi Terlampir)
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara melaporkan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Jabatan ASN akan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pelaksanaan Dan Pelaporan Pelatihan Non Klasikal Pada Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Seluruh Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat/pegawai yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022
Waktu : Pukul 08:30 s.d selesai
Tempat : Melalui Virtual Meeting Zoom
Link : (akan diinformasikan lebih lanjut)

Demi kelancaran pelaksanaan FGD, peserta dimohon melakukan registrasi untuk dapat kami infokan link zoom dan susunan kegiatan acara pada alamat <https://bit.ly/registrasidarindIP> paling lambat tanggal 11 Juni 2022. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Aulia (089514966509).

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Regional I-XIV Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, sebagai laporan.

Lampiran Surat Undangan Direktur Jabatan ASN
Nomor : 85/BM.02.01/UE/C.II/2022
Tanggal : 7 Juni 2022

DAFTAR UNDANGAN
Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Data Pengukuran IP ASN
Seluruh Instansi Pemerintah

Kementerian

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Agama
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Sosial
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pariwisata
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Lembaga Negara

Sekretariat Jenderal MPR
Sekretariat Jenderal DPR RI
Mahkamah Agung RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Setjen WANTANNAS
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Kepegawaian Negara
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Informasi Geospasial
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Lembaga Negara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Perpustakaan Nasional RI
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Kepolisian Negara
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Sekretariat Kabinet
Setjen Komisi Pemilihan Umum
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Setjen Dewan Perwakilan Daerah
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Badan Keamanan Laut RI
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Komisi Aparatur Sipil Negara
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Ombudsman Republik Indonesia
Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Setjen KOMNAS HAM
Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Kab. Banjarnegara
Pemerintah Kab. Bantul
Pemerintah Kab. Banyumas
Pemerintah Kab. Batang
Pemerintah Kab. Blora
Pemerintah Kab. Boyolali
Pemerintah Kab. Brebes
Pemerintah Kab. Cilacap
Pemerintah Kab. Demak
Pemerintah Kab. Grobogan
Pemerintah Kab. Gunung Kidul
Pemerintah Kab. Jepara
Pemerintah Kab. Karanganyar
Pemerintah Kab. Kebumen
Pemerintah Kab. Kendal
Pemerintah Kab. KlATEN

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Pemerintah Kab. Kudus
Pemerintah Kab. Kulon Progo
Pemerintah Kab. Magelang
Pemerintah Kab. Pati
Pemerintah Kab. Pekalongan
Pemerintah Kab. Pemalang
Pemerintah Kab. Purbalingga
Pemerintah Kab. Purworejo
Pemerintah Kab. Rembang
Pemerintah Kab. Semarang
Pemerintah Kab. Sleman
Pemerintah Kab. Sragen
Pemerintah Kab. Sukoharjo
Pemerintah Kab. Tegal
Pemerintah Kab. Temanggung
Pemerintah Kab. Wonogiri
Pemerintah Kab. Wonosobo
Pemerintah Kota Magelang
Pemerintah Kota Pekalongan
Pemerintah Kota Salatiga
Pemerintah Kota Semarang
Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kota Tegal
Pemerintah Kota Yogyakarta

Kantor Regional II BKN Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kab. Bangkalan
Pemerintah Kab. Banyuwangi
Pemerintah Kab. Blitar
Pemerintah Kab. Bojonegoro
Pemerintah Kab. Bondowoso
Pemerintah Kab. Gresik
Pemerintah Kab. Jember
Pemerintah Kab. Jombang
Pemerintah Kab. Kediri
Pemerintah Kab. Lamongan
Pemerintah Kab. Lumajang
Pemerintah Kab. Madiun
Pemerintah Kab. Malang
Pemerintah Kab. Mojokerto
Pemerintah Kab. Nganjuk
Pemerintah Kab. Ngawi
Pemerintah Kab. Pacitan
Pemerintah Kab. Pamekasan
Pemerintah Kab. Pasuruan
Pemerintah Kab. Ponorogo
Pemerintah Kab. Probolinggo
Pemerintah Kab. Sampang
Pemerintah Kab. Sidoarjo
Pemerintah Kab. Situbondo
Pemerintah Kab. Sumenep

Kantor Regional II BKN Surabaya

Pemerintah Kab. Trenggalek
Pemerintah Kab. Tuban
Pemerintah Kab. Tulungagung
Pemerintah Kota Batu
Pemerintah Kota Blitar
Pemerintah Kota Kediri
Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kab. Magetan
Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Mojokerto
Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Kota Probolinggo
Pemerintah Kota Surabaya

Kantor Regional III BKN Bandung

Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Kab. Bandung
Pemerintah Kab. Bandung Barat
Pemerintah Kab. Bekasi
Pemerintah Kab. Bogor
Pemerintah Kab. Ciamis
Pemerintah Kab. Cianjur
Pemerintah Kab. Cirebon
Pemerintah Kab. Garut
Pemerintah Kab. Indramayu
Pemerintah Kab. Karawang
Pemerintah Kab. Kuningan
Pemerintah Kab. Lebak
Pemerintah Kab. Majalengka
Pemerintah Kab. Pandeglang
Pemerintah Kab. Pangandaran
Pemerintah Kab. Purwakarta
Pemerintah Kab. Serang
Pemerintah Kab. Subang
Pemerintah Kab. Sukabumi
Pemerintah Kab. Sumedang
Pemerintah Kab. Tangerang
Pemerintah Kab. Tasikmalaya
Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Banjar
Pemerintah Kota Bekasi
Pemerintah Kota Bogor
Pemerintah Kota Cilegon
Pemerintah Kota Cirebon
Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Depok
Pemerintah Kota Serang
Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kantor Regional IV BKN Makassar

Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Kab. Banggai
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
Pemerintah Kab. Banggai Laut
Pemerintah Kab. Bantaeng
Pemerintah Kab. Barru
Pemerintah Kab. Bombana
Pemerintah Kab. Bone
Pemerintah Kab. Bulukumba
Pemerintah Kab. Buol
Pemerintah Kab. Buru
Pemerintah Kab. Buru Selatan
Pemerintah Kab. Buton
Pemerintah Kab. Buton Selatan
Pemerintah Kab. Buton Tengah
Pemerintah Kab. Buton Utara
Pemerintah Kab. Donggala
Pemerintah Kab. Enrekang
Pemerintah Kab. Gowa
Pemerintah Kab. Jeneponto
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
Pemerintah Kab. Kolaka
Pemerintah Kab. Kolaka Timur
Pemerintah Kab. Kolaka Utara
Pemerintah Kab. Konawe
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
Pemerintah Kab. Konawe Selatan
Pemerintah Kab. Konawe Utara
Pemerintah Kab. Luwu
Pemerintah Kab. Luwu Timur
Pemerintah Kab. Luwu Utara
Pemerintah Kab. Majene
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
Pemerintah Kab. Maluku Tengah
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
Pemerintah Kab. Mamasa
Pemerintah Kab. Mamuju
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
Pemerintah Kab. Maros
Pemerintah Kab. Morowali
Pemerintah Kab. Morowali Utara
Pemerintah Kab. Muna
Pemerintah Kab. Muna Barat
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pemerintah Kab. Parigi Moutong
Pemerintah Kab. Pasangkayu

Kantor Regional IV BKN Makassar

Pemerintah Kab. Pinrang
Pemerintah Kab. Polewali Mandar
Pemerintah Kab. Poso
Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
Pemerintah Kab. Sigi
Pemerintah Kab. Sinjai
Pemerintah Kab. Soppeng
Pemerintah Kab. Takalar
Pemerintah Kab. Tana Toraja
Pemerintah Kab. Tojo Una-Una
Pemerintah Kab. Tolitoli
Pemerintah Kab. Toraja Utara
Pemerintah Kab. Wajo
Pemerintah Kab. Wakatobi
Pemerintah Kota Ambon
Pemerintah Kota Baubau
Pemerintah Kota Kendari
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kota Palopo
Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Kota Parepare
Pemerintah Kota Tual

Kantor Regional V BKN Jakarta

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Lampung
Pemerintah Kab. Bengkayang
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
Pemerintah Kab. Kayong Utara
Pemerintah Kab. Ketapang
Pemerintah Kab. Kubu Raya
Pemerintah Kab. Lampung Barat
Pemerintah Kab. Lampung Selatan
Pemerintah Kab. Lampung Tengah
Pemerintah Kab. Lampung Timur
Pemerintah Kab. Lampung Utara
Pemerintah Kab. Landak
Pemerintah Kab. Melawi
Pemerintah Kab. Mempawah
Pemerintah Kab. Mesuji
Pemerintah Kab. Pesawaran
Pemerintah Kab. Pesisir Barat
Pemerintah Kab. Pringsewu
Pemerintah Kab. Sambas
Pemerintah Kab. Sanggau
Pemerintah Kab. Sekadau
Pemerintah Kab. Sintang
Pemerintah Kab. Tanggamus
Pemerintah Kab. Tulang Bawang

Kantor Regional V BKN Jakarta

Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
Pemerintah Kab. Way Kanan
Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pemerintah Kota Metro
Pemerintah Kota Pontianak
Pemerintah Kota Singkawang

Kantor Regional VI BKN Medan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Kab. Asahan
Pemerintah Kab. Batubara
Pemerintah Kab. Dairi
Pemerintah Kab. Deli Serdang
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
Pemerintah Kab. Karo
Pemerintah Kab. Labuhanbatu
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
Pemerintah Kab. Langkat
Pemerintah Kab. Mandailing Natal
Pemerintah Kab. Nias
Pemerintah Kab. Nias Barat
Pemerintah Kab. Nias Selatan
Pemerintah Kab. Nias Utara
Pemerintah Kab. Padang Lawas
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
Pemerintah Kota Padangsidimpuan
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Pemerintah Kab. Samosir
Pemerintah Kab. Simalungun
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
Pemerintah Kab. Toba
Pemerintah Kota Binjai
Pemerintah Kota Gunung Sitoli
Pemerintah Kota Medan
Pemerintah Kota Pematangsiantar
Pemerintah Kota Sibolga
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Pemerintah Kota Tanjungbalai

Kantor Regional VII BKN Palembang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Jambi
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pemerintah Kab. Bangka
Pemerintah Kab. Bangka Barat
Pemerintah Kab. Bangka Selatan

Kantor Regional VII BKN Palembang

Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Pemerintah Kab. Banyuasin
Pemerintah Kab. Batang Hari
Pemerintah Kab. Belitung
Pemerintah Kab. Belitung Timur
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
Pemerintah Kab. Bungo
Pemerintah Kab. Empat Lawang
Pemerintah Kab. Kaur
Pemerintah Kab. Kepahiang
Pemerintah Kab. Kerinci
Pemerintah Kab. Lahat
Pemerintah Kab. Lebong
Pemerintah Kab. Merangin
Pemerintah Kab. Muara Enim
Pemerintah Kab. Muaro Jambi
Pemerintah Kab. Mukomuko
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
Pemerintah Kab. Musi Rawas
Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
Pemerintah Kab. Ogan Ilir
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pemerintah Kab. Rejang Lebong
Pemerintah Kab. Sarolangun
Pemerintah Kab. Seluma
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
Pemerintah Kab. Tebo
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Kota Jambi
Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Pemerintah Kota Pagar Alam
Pemerintah Kota Palembang
Pemerintah Kota Pangkal Pinang
Pemerintah Kota Prabumulih
Pemerintah Kota Sungai Penuh

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kab. Banjar
Pemerintah Kab. Barito Kuala
Pemerintah Kab. Barito Selatan
Pemerintah Kab. Barito Timur

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Pemerintah Kab. Barito Utara
Pemerintah Kab. Berau
Pemerintah Kab. Balangan
Pemerintah Kab. Bulungan
Pemerintah Kab. Gunung Mas
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
Pemerintah Kab. Kapuas
Pemerintah Kab. Katingan
Pemerintah Kab. Kotabaru
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
Pemerintah Kab. Kutai Barat
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
Pemerintah Kab. Kutai Timur
Pemerintah Kab. Lamandau
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
Pemerintah Kab. Malinau
Pemerintah Kab. Murung Raya
Pemerintah Kab. Nunukan
Pemerintah Kab. Paser
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
Pemerintah Kab. Pulang Pisau
Pemerintah Kab. Seruyan
Pemerintah Kab. Sukamara
Pemerintah Kab. Tabalong
Pemerintah Kab. Tana Tidung
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
Pemerintah Kab. Tanah Laut
Pemerintah Kab. Tapin
Pemerintah Kota Bontang
Pemerintah Kota Balikpapan
Pemerintah Kota Banjarbaru
Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Palangka Raya
Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kota Tarakan

Kantor Regional IX BKN Jayapura

Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Kab. Asmat
Pemerintah Kab. Biak Numfor
Pemerintah Kab. Boven Digoel
Pemerintah Kab. Deiyai
Pemerintah Kab. Dogiyai
Pemerintah Kab. Intan Jaya
Pemerintah Kab. Jayapura
Pemerintah Kab. Jayawijaya
Pemerintah Kab. Keerom
Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
Pemerintah Kab. Lanny Jaya

Kantor Regional IX-BKN Jayapura

Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
Pemerintah Kab. Mappl
Pemerintah Kab. Merauke
Pemerintah Kab. Mimika
Pemerintah Kab. Nabire
Pemerintah Kab. Nduga
Pemerintah Kab. Paniai
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
Pemerintah Kab. Puncak
Pemerintah Kab. Puncak Jaya
Pemerintah Kab. Sarmi
Pemerintah Kab. Supiori
Pemerintah Kab. Tolikara
Pemerintah Kab. Waropen
Pemerintah Kab. Yahukimo
Pemerintah Kab. Yalimo
Pemerintah Kota Jayapura

Kantor Regional X-BKN Denpasar

Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi NTT
Pemerintah Kab. Alor
Pemerintah Kab. Badung
Pemerintah Kab. Bangli
Pemerintah Kab. Belu
Pemerintah Kab. Bima
Pemerintah Kab. Buleleng
Pemerintah Kab. Dompu
Pemerintah Kab. Ende
Pemerintah Kab. Flores Timur
Pemerintah Kab. Gianyar
Pemerintah Kab. Jembrana
Pemerintah Kab. Karangasem
Pemerintah Kab. Klungkung
Pemerintah Kab. Kupang
Pemerintah Kab. Lembata
Pemerintah Kab. Lombok Barat
Pemerintah Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kab. Lombok Timur
Pemerintah Kab. Lombok Utara
Pemerintah Kab. Malaka
Pemerintah Kab. Manggarai
Pemerintah Kab. Manggarai Barat
Pemerintah Kab. Manggarai Timur
Pemerintah Kab. Nagekeo
Pemerintah Kab. Ngada
Pemerintah Kab. Rote Ndao
Pemerintah Kab. Sabu Raijua
Pemerintah Kab. Sikka
Pemerintah Kab. Sumba Barat

Kantor Regional X BKN Denpasar

Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
Pemerintah Kab. Sumba Timur
Pemerintah Kab. Sumbawa
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
Pemerintah Kab. Tabanan
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
Pemerintah Kota Bima
Pemerintah Kota Denpasar
Pemerintah Kota Kupang
Pemerintah Kota Mataram

Kantor Regional XI BKN Manado

Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Kab. Boalemo
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
Pemerintah Kab. Bone Bolango
Pemerintah Kab. Gorontalo
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
Pemerintah Kab. Halmahera Barat
Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
Pemerintah Kab. Halmahera Timur
Pemerintah Kab. Halmahera Utara
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
Pemerintah Kab. Minahasa
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
Pemerintah Kab. Minahasa Utara
Pemerintah Kab. Pohuwato
Pemerintah Kab. Pulau Morotai
Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Pemerintah Kota Bitung
Pemerintah Kota Gorontalo
Pemerintah Kota Kota Mobagu
Pemerintah Kota Manado
Pemerintah Kota Ternate
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Kota Tomohon
Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
Pemerintah Kab. Kepulauan Sula

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Kab. Agam
Pemerintah Kab. Bengkalis
Pemerintah Kab. Bintan
Pemerintah Kab. Dharmasraya
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
Pemerintah Kab. Kampar
Pemerintah Kab. Karimun
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
Pemerintah Kab. Lingga
Pemerintah Kab. Natuna
Pemerintah Kab. Padang Pariaman
Pemerintah Kab. Pasaman
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
Pemerintah Kab. Pelalawan
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Pemerintah Kab. Rokan Hilir
Pemerintah Kab. Rokan Hulu
Pemerintah Kab. Siak
Pemerintah Kab. Sijunjung
Pemerintah Kab. Solok
Pemerintah Kab. Solok Selatan
Pemerintah Kab. Tanah Datar
Pemerintah Kota Batam
Pemerintah Kota Bukittinggi
Pemerintah Kota Dumai
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Kota Padang Panjang
Pemerintah Kota Pariaman
Pemerintah Kota Payakumbuh
Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Sawahlunto
Pemerintah Kota Solok
Pemerintah Kota Tanjungpinang

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Pemerintah Aceh
Pemerintah Kab. Aceh Barat
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
Pemerintah Kab. Aceh Besar
Pemerintah Kab. Aceh Jaya
Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Pemerintah Kab. Aceh Singkil
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
Pemerintah Kab. Aceh Tengah

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
Pemerintah Kab. Aceh Timur
Pemerintah Kab. Aceh Utara
Pemerintah Kab. Bener Meriah
Pemerintah Kab. Bireuen
Pemerintah Kab. Gayo Lues
Pemerintah Kab. Nagan Raya
Pemerintah Kab. Pidie
Pemerintah Kab. Pidie Jaya
Pemerintah Kab. Simeulue
Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kota Langsa
Pemerintah Kota Lhokseumawe
Pemerintah Kota Sabang
Pemerintah Kota Subulussalam

Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kab. Fak-Fak
Pemerintah Kab. Kaimana
Pemerintah Kab. Manokwari
Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
Pemerintah Kab. Maybrat
Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
Pemerintah Kab. Raja Ampat
Pemerintah Kab. Sorong
Pemerintah Kab. Sorong Selatan
Pemerintah Kab. Tambrau
Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
Pemerintah Kab. Teluk Wondama
Pemerintah Kota Sorong